

Creating Shared Value (CSV): konsep baru dalam dunia usaha

Hesti L. Tata

Selama ini, para pengusaha terutama di sektor industri telah mengenal istilah *corporate social responsibility* (CSR) yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat secara luas, yang memiliki nilai strategis dan dipandang sebagai keunggulan kompetitif perusahaan serta dapat menumbuhkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Pendefinisian ulang konsep dan istilah CSR dipandang perlu mengingat tanggung jawab sosial bukan hanya kewajiban bagi perusahaan, tetapi juga bagi semua pihak. Dalam rangka mewujudkan tanggung jawab bagi semua pihak, maka perlu diciptakan manfaat bersama atau *creating shared value* (CSV) sehingga tanggung jawab bersama dapat terbentuk. Menurut Porter & Kramer (2011), CSV merupakan kebijakan dan proses teknis operasional yang meningkatkan nilai-nilai kompetitif perusahaan dan secara bersamaan memajukan kondisi sosial dan ekonomi. Namun, agar tanggung jawab tersebut terjadi secara efektif dan

efisien, maka CSV haruslah diciptakan di setiap tahap rantai bisnis. Misalnya, dalam perusahaan yang bergerak di bidang pangan dan nutrisi, CSV berada pada tiga komponen utama, yaitu: (1) pertanian dan pembangunan berkelanjutan, (2) lingkungan manufaktur dan sumber daya manusianya (SDM), serta (3) produk dan konsumen. Dengan konsep ini, baik perusahaan maupun masyarakat akan mendapatkan manfaat yang sinergis.

Pada mata rantai pertama, pertanian dan petani menjadi fokus utama dalam peningkatan manfaat bersama. Petani dan perusahaan saling terkait sebagai produsen dan konsumen. Pihak pengusaha (dalam hal ini bertindak sebagai konsumen) mau membeli produk pertanian berkualitas tinggi dari petani (produsen), oleh karena itu konsumen perlu meningkatkan pengetahuan petani dengan memberikan pelatihan dan sarana

untuk mencapai kualitas produk yang dibutuhkan. Mendidik petani dan

keluarganya sekaligus meningkatkan pemberdayaan dan kesadaran petani akan pembangunan yang berkelanjutan. Di lain pihak, pengusaha sebagai konsumen harus memberikan harga yang sesuai dengan kualitas barang yang dihasilkan oleh petani dan menghargai usaha yang dilakukan petani dalam memproduksi barang apabila telah memasukkan unsur-unsur pembangunan berkelanjutan.

Pada mata rantai kedua, manufaktur atau industri menciptakan manfaat bersama bagi sumber daya manusia yang bekerja pada sektor industri tersebut. Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai, mendidik karyawan yang trampil dan bermotivasi serta bertanggung jawab, juga merupakan faktor penting dalam menciptakan manfaat bersama.

Melalui produknya, perusahaan tidak hanya mencari untung, tetapi juga berkewajiban untuk mencerdaskan pembeli (konsumen akhir) baik secara



Perkebunan kopi di Lembah Lembah Masurai, Merangin, Jambi. Biji kopi yang sudah matang (inset) | foto: Asep Ayat

langsung melalui produk maupun secara tidak langsung melalui tayangan iklan yang cerdas. Sebagai contoh, bagi industri pangan, menyajikan fakta gizi atau nutrisi yang terkandung dalam produk adalah hal yang sangat penting. Selain itu, pihak perusahaan ditantang untuk menciptakan produk-produk inovatif yang kaya gizi tetapi rendah lemak dan kalori. Pihak konsumen seharusnya kritis dalam memeriksa produk yang hendak dibelinya, baik tanggal kedaluwarsa, kandungan nutrisi, saran penyajian dan layanan produsen terhadap konsumen.

Di Indonesia, tidak seperti CSR, CSV belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun bagi perusahaan, pelaksanaan CSV berarti pemenuhan prasyarat hukum dan kaidah bisnis, serta menjaga keberlanjutan bagi perusahaan. Selain itu yang dimaksud adalah pembangunan pedesaan (khususnya petani), kualitas dan kuantitas air serta gizi masyarakat.

Selain itu, CSV juga berarti menjaga nilai –nilai sosial. Dalam industri pangan yang berkaitan dengan pertanian, nilai-nilai sosial yang dimaksud adalah pembangunan pedesaan (khususnya petani), kualitas dan kuantitas air serta gizi masyarakat.

Konsep CSV ini telah diaplikasikan oleh sebuah sektor industri pangan, yang melibatkan petani sebagai produsen, sebagai produk pertanian kepada pihak industri. Pihak industri memberikan pembelajaran kepada petani untuk dapat meningkatkan kualitas pertanian, seperti kopi dan cacao, sehingga dapat memenuhi kualitas permintaan perusahaan. Selain itu mengadakan pembangunan pedesaan dalam program listrik mandiri biogas bagi peternak sapi.

Seiring dengan sasaran program 'tujuan pembangunan millennium atau Millenium Development Goal (MDG), menciptakan manfaat bersama (CSV)

perlu digerakkan di berbagai sektor usaha. Ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan menjamin daya dukung lingkungan hidup, mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan. Untuk itulah, sebuah perusahaan pangan dan nutrisi terkemuka menyajikan forum diskusi dan berbagi pengalaman dalam CSV guna penguatan kemitraan dalam bidang nutrisi dan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Sebuah inisiasi yang menarik untuk membangun kemitraan antara industri, pemerintah dan masyarakat.

Porter M, Kramer M. 2011. *Creating Shared Value: How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth.* Harvard Business Review, January-February 2011. Available in the internet. [https://archive.harvardbusiness.org/cia/web/pl/product.seam?c=8062&i=8064&cs=1b64dfac8e4d2ef4da5976b5665c5540]

pojok publikasi

Policy Brief

Menuju Pengakuan "Hutan Nagari" di Nagari Salingka Danau Singkarak

Jomi Suhendri and Putra Agung

Masyarakat Sumatera Barat khususnya Nagari Salingka Danau Singkarak saat ini memiliki peluang untuk mengelola hutan melalui kebijakan hutan desa dan sistem adatnya. Dalam mewujudkan rencana masyarakat Nagari Salingka Danau Singkarak untuk mengusulkan wilayah yang akan dijadikan hutan desa/nagari perlu dilakukan pendampingan yang intensif. Keinginan ini tentu harus mendapat dukungan dari semua pihak, baik itu dari Pemda, DPRD dan LSM. Dengan adanya hutan nagari ini, kelak diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Meso Debat

Menghubungkan Debat Makro dan Mikro dalam Menyiapkan Strategi REDD Daerah

Martua T Sirait and Putra Agung

Saat ini kita dibanjiri informasi dan debat tentang perubahan iklim, terutama tentang penyebab perubahan iklim dan langkah-langkah pencegahan (mitigasi) dan usaha usaha menghadapi (adaptasi) perubahan iklim. Informasi yang didapatkan dan debat yang kita dengar serta ikuti sangat beragam, mulai dari tataran Global (Makro) yang berbicara tentang tanggung jawab Negara industri/maju dan negara berkembang sampai di tingkat yang sangat kecil di warung kopi, dipinggir hutan (Mikro) yang kadang terjebak pada pemahaman hutan = uang.

Tulisan ini akan menekankan pada proses penyiapan agenda strategi perubahan iklim di daerah yang akan



banyak mewarnai proses perdebatan REDD dalam beberapa tahun kedepan yang merupakan kewajiban

daerah guna mendukung target penurunan emisi nasional 26% (khususnya dari sektor tata guna lahan untuk pertanian dan hutan), dengan mengesampingkan dulu perdebatan insentif REDD serta perdagangan karbon.

Rencana Tata Ruang Wilayah dan Distribusi Manfaat Sumberdaya Hutan

Putra Agung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu atau bahkan satu-satunya peluang untuk mencapai pembangunan rendah emisi. Sebagai suatu institusi (*rule of game*), RTRW tidak terlepas dari permasalahan mendasar yang melandasi proses pembentukannya. Hal inilah yang membuat RTRW sebagai suatu dokumen legal sering kali gagal menjadi acuan pembangunan daerah. RTRW tidak hanya sebatas legalisasi pemanfaatan dan pembagian ruang atas sumberdaya alam (SDA) namun lebih dari itu, karena pada setiap sumber daya alam melekat hak yang berbeda atas manfaat yang berbeda-beda pula. Tulisan ini merupakan opini penulis sebagai suatu identifikasi awal dalam memahami permasalahan distribusi manfaat sumberdaya hutan dan lahan didalam RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat

(Tanjung Barat) dan kebijakan kehutanan pada umumnya. Cara pandang Teori Akses digunakan untuk menguraikan alokasi dan distribusi manfaat sumberdaya hutan dan lahan untuk menuju pembangunan rendah emisi.

Management of Sesoot Forest: Quo Vadis?

Gemma Galudra

Hutan Sesoot terletak di antara DAS Dodokan, di sebelah barat Taman Nasional gunung Rinjani dengan luas area 5.950 ha. Secara administratif, Hutan Lindung. Status ini didasarkan pada pentingnya fungsi hutan sebagai bagian dari DAS yang menyediakan air untuk irigasi skala besar dan air minum bagi masyarakat hilir, khususnya warga Mataram di Lombok Barat dan beberapa daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

hutan Sesoot merupakan milik Kecamatan Narmada dan Lingsar Kabupaten Lombok Barat dan dikelilingi oleh 4 desa yaitu Sesoot, Lebah Sempage, Sedau and Batu Mekar. Menurut Keputusan Menteri Pertanian No. 756/Kpts/Um/1982, status dan fungsi hutan Sesoot adalah Hutan Lindung. Status ini didasarkan pada pentingnya fungsi hutan sebagai bagian dari DAS yang menyediakan air untuk irigasi skala besar dan air minum bagi masyarakat hilir, khususnya warga Mataram di Lombok Barat dan beberapa daerah di Kabupaten Lombok Tengah.

Fungsi dan potensi lain dari hutan Sesoot adalah ekowisata. Sejak dekade terakhir, masyarakat Lombok Barat sudah menganggap Hutan Sesoot sebagai bagian rekreasi untuk hiking, berkemah dan berbagai kegiatan olahraga air di sekitar air terjun. Konservasi keanekaragaman hayati juga merupakan potensi lain dari Hutan Sesoot yaitu menjadi rumah bagi siamang (*Hylobates*), rusa (*Dama dama*), kera (*Simianus*) dan burung (*Aves*), khususnya burung 'Cabe Lombok' (*Dicaeura mauei*).